



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**



RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

Jl. Jend. Soedirman No 42 Banjarnegara

TELP(0286) 591464, FAX(0286) 592462, IGD 118 WEBSITE :

rsud.banjarnegarakab.go.id, email: rsud@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2024 dapat tersusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan serta penutup.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Hj. Anna lasmanah Banjarnegara ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja dimaksud.

Banjarnegara, Januari 2023
DIREKTUR
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

dr. ERNA ASTUTY
NIP. 19710830 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.1 Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB V PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja

Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tugas Pokok dan fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

1.1.1 Tugas Pokok

RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang pelayanan kesehatan.

1.1.2 Fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang; dan
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan rujukan yang meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang.

1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

- a. Direktur

- b. Bagian Tata Usaha
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Hukum dan Kehumasan
- c. Bidang Keuangan
 - 1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
 - 2. Seksi Akuntansi dan Verifikasi
- d. Bidang Pelayanan
 - 1. Seksi Pelayanan Medis
 - 2. Seksi Keperawatan
- e. Bidang Penunjang
 - 1. Seksi Penunjang Klinik
 - 2. Seksi Penunjang Non Klinik
- f. Kelompok jabatan fungsional

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Banjarnegara. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Banjarnegara, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Banjarnegara dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara oleh Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Thun 2022;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara;

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 pada anggaran murni terdiri dari 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 170.408.757.717,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), dan pada Bulan Oktober 2022 ditetapkan perubahan anggaran dengan jumlah program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi 2 (dua) program, 4 (Empat) kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 171.802.060.040,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan ratus Dua Juta Enam Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah) dengan fokus utama pada Pembangunan Manusia melalui peningkatan SDM dan Peningkatan Pelayanan Rujukan yaitu dengan melalui Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga medis maupun non medis, penyediaan sarana dan prasarana yang memadahi, penyediaan logistik rumah sakit, dan penanganan pandemi covid-19 di rumah sakit. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Indikator BOR belum tercapai hal ini disebabkan karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sehingga kunjungan pasien masih belum stabil dan beberapa ruang perawatan dialihfungsikan menjadi ruang isolasi
2. Indikator kelengkapan jenis spesialis belum terpenuhi karena masih kurangnya minat dokter spesialis bekerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk jenis spesialis baru.

Dari 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 171.802.060.040,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah atau berkurang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula Rp. 20.076.098.295,- menjadi Rp. 21.152.659.094,-
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula Rp. 465.659.936,- menjadi Rp. 465.659.936,-
 - c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang semula Rp. 149.866.999.486,- menjadi Rp. 149.519.878.457,-
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar yang semula tidak ada kemudian mendapat alokasi anggaran perubahan sebesar Rp.663.862.553,-

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik dikarenakan adanya

pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan realisasi fisik 97,44%. Capaian realisasi fisik belum tercapai 100%. Faktor – faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut adalah :

- 1) Kurangnya minat dokter spesialis bekerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk jenis spesialis baru,
- 2) Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terkendala waktu dan adanya pekerjaan belanja modal bangunan kesehatan Rp. 34.703.000.000 yang belum bisa dilakukan dikarenakan belum lengkapnya proses perijinan yang harus dipenuhi.
- 3) Terbatasnya waktu dalam pekerjaan kegiatan belanja modal rehabilitasi bangunan gedung senilai Rp. 13.922.157.200,- sehingga jangka waktu pekerjaan melebihi kontrak dan diberlakukan denda sesuai ketentuan.
- 4) kunjungan pasien masih belum stabil baik di Instalasi Rawat Inap, Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat, selain itu beberapa ruang perawatan dialihfungsikan menjadi ruang isolasi,
- 5) Beberapa alat kesehatan, obat dan BHP yang dibutuhkan pada awal tahun belum tayang di e-catalog sehingga proses pengadaan terhambat dan beralih ke penunjukan langsung atau secara reguler dengan jumlah yang terbatas,

6) Alat-alat kesehatan yang dibutuhkan merupakan barang import sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengirimannya.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar dengan realisasi fisik 100 % namun realisasi keuangan sebesar 76,29 %. Hal ini disebabkan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk membiayai insentif tenaga kesehatan covid-19 sampai dengan bulan Desember 2022, sehingga insentif yang terbayarkan baru sampai bulan September 2022.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi fisik 100% dan keluaran dengan indikator jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan dengan target 1 tahun tercapai dengan hasil persentase terbayarnya gaji ASN sebesar 100%

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian realisasi fisik 100% dan keluaran dengan indikator jumlah Gaji PTT yang terbayarkan dengan target 1 tahun tercapai dengan hasil persentase terlayannya administrasi perkantoran sebesar 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Pelaksanaan pengadaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang sudah disusun,

2. Tertib administrasi dalam pengajuan SPJ.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk mengatasi ketidaktercapaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Memastikan bahwa alat kesehatan, obat dan BHP yang dibutuhkan tercantum dalam e-catalog
2. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada awal tahun anggaran
3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan berpedoman kepada Renstra dan Renja
4. Perlu adanya aturan/dasar hukum dalam memfasilitasi kebutuhan belanja modal yang mendesak yang sangat dibutuhkan untuk fasilitas pelayanan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terbayarnya gaji PNS/ASN	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	-	1 Tahun	1 tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	322 orang/bln	-	-	-	-	307 orang/bln	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terbayarnya gaji PTT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji PTT yang terbayarkan	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kelengkapan jenis pelayanan spesialis	23 jenis	16 jenis	22 jenis	16 jenis	73%	22 jenis	22 jenis	100%
		Cost Recovery Ratio (CRR)/Kemampuan Pendapatan untuk membiayai operasional	91%	142%	86%	91%	100%	90%	90%	100%
		Persentase Capaian SPM rumah sakit yang mencapai target	≥ 80%	87,96%	≥ 80%	87,03%	100%	≥ 80%	≥ 80%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Kenaikan Kunjungan Pelayanan Unggulan	2%	-1,3%	17.022 pasien	13.670 pasien	100%	2%	2%	100%
		Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis SPM	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pemenuhan standar kualitas pelayanan Rumah Sakit : BOR, AvLOS, TOI,	BOR = 60%, AvLOS = 3hari, TOI = 3hari, BTO = 50kali, GDR ≤ 25%, NDR = ≤ 15%	BOR = 42,92, AvLOS = 3,3 hari, TOI = 5,8 hari, BTO = 42 kali	BOR = 60-75%, AvLOS = 3-6 hari, TOI = 1-3 hari, BTO = 50-70 kali	BOR = 54%, AvLOS = 3,4 hari, TOI = 2,5 hari, BTO = 72 kali	97,59%	BOR = 60%, AvLOS = 3hari, TOI = 3hari, BTO = 50kali, GDR ≤ 25%, NDR = ≤ 15%	BOR = 60%, AvLOS = 3hari, TOI = 3hari, BTO = 50kali, GDR ≤ 25%, NDR = ≤ 15%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		BTO, GDR, NDR								
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase terpenuhinya sarana prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemenuhan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 yang terbayarkan	-	1 tahun	1 tahun	9 bulan	75%	1 tahun	1 tahun	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 (tiga) Indikator. Dari 3 (tiga) indikator tersebut, 1 (satu) indikator berstatus tercapai dan 2 (dua) indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang tercapai :

a. Indikator yang tercapai

1. Target Indikator kinerja bertahannya status akreditasi tahun 2022 Paripurna (100%), meskipun tidak dilakukan survey verifikasi akreditasi dikarenakan adanya proses pembangunan gedung Gizi, Laundry, IPSRS, Gudang Umum dan Gudang Farmasi sesuai dengan rekomendasi hasil survey akreditasi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas mutu pelayanan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara telah sesuai dengan standard mutu pelayanan yang ditetapkan Pemerintah. Namun demikian RSUD Hj. Anna Lasmanah tetap berbenah dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Indikator tingkat pemanfaatan rumah sakit (rawat inap);
 - AvLOS: (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien
Indikator AvLOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien yang ditargetkan tahun 2022 yaitu 3-6, realisasi capaian 3,4 hari. Hal ini menunjukkan bahwa indikator AvLOS sudah tercapai sesuai target, yang berarti mutu pelayanan sudah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kemenkes.
 - TOI: (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan
Indikator TOI: (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan tahun 2022 di targetkan 1-3 hari, realisasi capaian TOI 2,5 hari, Hal ini menunjukkan bahwa indikator TOI sudah tercapai yang berarti mutu pelayanan sudah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kemenkes.
 - BTO: (Bed Turn Over) / Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur

Indikator BTO: (Bed Turn Over) / Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur tahun 2021 ditargetkan 50-70 kali, realisasi capaian BTO 70,2 kali, hal ini menunjukkan bahwa indikator BTO sudah tercapai yang berarti mutu pelayanan sudah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kemenkes.

b. Indikator yang belum tercapai

1. Indikator tingkat pemanfaatan rumah sakit (rawat inap)

- BOR: (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap

Indikator BOR ditargetkan 60-70%, realisasi capaian BOR 54%. tidak tercapainya indikator BOR dari yang ditargetkan karena turunnya kunjungan dan beberapa ruang perawatan yang dialihkan menjadi ruang isolasi di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dikarenakan masih berlanjutnya Pandemi covid-19. Belum tercapainya target juga dipengaruhi oleh masih belum stabilnya kunjungan di rumah sakit sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kunjungan pasien baik pada poliklinik, instalasi gawat darurat maupun instalasi rawat inap sehingga BOR rumah sakit menjadi rendah.

3. Kelengkapan Jenis Pelayanan Spesialis

Indikator kelengkapan jenis pelayanan spesialis tahun 2022 ditargetkan 22 jenis spesialis, realisasi capaian 16 jenis spesialis, hal ini menunjukkan bahwa indikator Kelengkapan jenis pelayanan spesialis belum tercapai sesuai target, hal ini disebabkan kurangnya minat dokter spesialis untuk bekerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan belum dianggarkannya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk jenis spesialis yang belum ada. Perlu adanya kebijakan tentang penggajian dan reward untuk dokter spesialis agar dokter spesialis tertarik untuk bekerja di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian / ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum stabilnya jumlah kunjungan pasien baik di rawat jalan, rawat inap maupun IGD karena masih berlangsungnya pandemi covid-19

2. Sistem penggajian dan reward bagi dokter spesialis yang belum optimal
Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:
 1. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar
 2. Pemenuhan sarana dan sarana penunjang Rumah Sakit untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan
 3. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan serta penambahan SDM
 4. Pengembangan pelayanan unggulan Rumah Sakit dan pemanfaatan teknologi kedokteran
 5. Pengembangan manajemen dan penyempurnaan tata kelola Rumah Sakit.
 6. Adanya kebijakan tentang penggajian dan reward bagi dokter spesialis.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Terakreditasi	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
2	SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	-	-	80%	80%	80%	80%	83,86%	86,07%	84%	84%	IKU sesuai target
3	Nilai AKIP RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	-	-	65	68	75,3	76	68,66	68,29	68	68	IKU sesuai target
4	Persentase peningkatan Kunjungan RS	-	-	5%	5%	5%	5%	-25,31%	31%	5%	5%	IKU sesuai target
5	Status Akreditasi Rumah Sakit	-	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	IKU sesuai target

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan bidang kesehatan, yaitu yaitu sesuai dengan misi ke 5 Kabupaten Banjarnegara “Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pemenuhan hak dasar”. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup pemenuhan hak dasar khususnya dalam bidang kesehatan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan berobat ke rumah sakit swasta,
2. Sistem Manajemen Rumah sakit (SIM-RS) masih belum terintegrasi dengan baik,
3. Kurangnya sarana prasarana rumah sakit seperti ruang tunggu pasien, lahan parkir bagi pengunjung dan karyawan,
4. Kelengkapan fasilitas peralatan medis guna menunjang pelayanan,
5. Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) yang masih rendah, yang merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 di tahun 2022,
6. Kurang efisiennya pelaksanaan tupoksi yang berdampak pada kurang efektifnya pelayanan kesehatan,
7. Fungsi Promosi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara belum optimal, sehingga masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan rumah sakit.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Menurunnya jumlah kunjungan rumah sakit
2. Tidak terpenuhinya target indikator kelengkapan jenis spesialis

3. Kurang optimalnya mutu pelayanan sesuai dengan standar minimal pelayanan
4. Kurang optimalnya sistem informasi dikarenakan ada beberapa aplikasi yang belum terintegrasi
5. Rendahnya minat masyarakat untuk berobat di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

a. Tantangan

- 1) Adanya stigma atau pandangan kurang baik terhadap pelayanan Rumah Sakit pemerintah
- 2) Bertumbuh dan berkembangnya rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten Banjarnegara
- 3) Kesadaran dan peran serta sektor lain yang masih kurang dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit, utamanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis
- 4) Masih ada pemahaman stakeholder yang kurang benar terhadap kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dianggap akan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya kemandirian total Rumah Sakit dan lepas dari subsidi Pemda serta anggapan bahwa PPK-BLU lebih berorientasi pada keuntungan.

b. Peluang

- 1) Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
- 2) Adanya kesempatan dalam melakukan Kerjasama Operasional (KSO) untuk peningkatan pelayanan

- 3) Kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Program Pendidikan Dokter / Dokter Gigi Spesialis (PPDS), formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, konflik, tidak diminati dan daerah bencana
- 4) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Kabupaten (APBD II), Provinsi (APBD I) dan Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi/Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Manajemen mutu SDM dalam peningkatan mutu pelayanan (kualitas, kuantitas, kompetensi baik tenaga medis, paramedis, dan non-medis) belum optimal,
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional rumah sakit,
3. Kurangnya minat dokter spesialis untuk bergabung dengan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara,
4. Masih rendahnya persentase Bed Occupancy Rate (BOR) yang merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 di tahun 2022,
5. Kurang efisiennya pelaksanaan tupoksi yang berdampak pada kurang efektifnya pelayanan kesehatan,
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk menunjang pelayanan
7. Belum Optimalnya Fungsi Promosi RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pembangunan yang dilakukan di segala bidang selain membawa pertumbuhan yang cepat juga mengakibatkan terjadinya perubahan pada lingkungan, pola hidup masyarakat dan juga pada pemanfaatan pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumah sakit.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 Tujuan Strategis Tahun 2020-2024 dimana pada Tujuan Strategis kedua disebutkan:

- Tujuan Strategis : Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Sasaran Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Indikator : 1. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas;
2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100%;
3. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%;
4. Persentase RS terakreditasi sebesar 100%;
5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes.

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 106.971 hektar, dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2021 sebanyak 1.0126.866 jiwa (BPS, 2022). Terdapat 4 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur per 12 Januari 2022 sebanyak 726 TT (Kementerian Kesehatan, 2022), sementara tempat tidur Puskesmas Rawat Inap sebanyak 184 TT (Dinkes Kab. Banjarnegara, 2022) sehingga jumlah tempat tidur yang tersedia seluruhnya berjumlah 910 TT, dengan rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk sebesar 0,89 TT per 1.000 penduduk.

Berdasarkan target indikator sasaran strategis rasio TT yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebesar 1:1.000 maka jumlah tempat tidur yang tersedia untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara masih di bawah target nasional dengan kekurangan sebanyak 108 TT apabila merujuk pada data penduduk 2020.

RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yaitu sesuai dengan misi ke 5 Kabupaten Banjarnegara “Mewujudkan Kemartabatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pemenuhan hak dasar”. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta berdasarkan hasil evaluasi dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, untuk tahun 2023 mencakup pemenuhan hak dasar khususnya dalam bidang Kesehatan termasuk didalamnya pemenuhan ketersediaan jumlah tempat tidur sesuai target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025, dan mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Salah satu prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada tahun 2024 adalah operasional lantai 1 dan 2 gedung B RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

Rencana operasional lantai 1 dan 2 gedung B RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara disusun berdasarkan latar belakang sebagai berikut:

1. Terbangunnya gedung B RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada tahun 2023;
2. Masukan/saran dari masyarakat atas kurang memadainya ruang poliklinik, ruang tunggu dan lahan parkir, baik yang disampaikan secara langsung, melalui DPRD maupun pada saat survey kepuasan pelanggan.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Pelaksanaan Survei Verifikasi Akreditasi
2. Penilaian Ijin Operasional
3. Rekrutmen pegawai sesuai Kebutuhan (Spesialis Syaraf, Spesialis Bedah)
4. Pengembangan Pelayanan Unggulan
5. Penambahan Alat-Alat Kesehatan Pemantapan Kerjasama pihak ke 3 dan KSO Sesuai Kebutuhan
6. Peningkatan Kompetensi Pegawai
7. Pembuatan Groundtank dan Hidran Terpadu
8. Pengembangan SIM RS
9. Penyempurnaan sentralisasi jaringan oksigen
10. Penataan Gedung CSSD
11. Pengembangan system elektronik pengelolaan linen
12. Penyempurnaan e-RM
13. Pengembangan unit pengadaan RS terintegrasi
14. Pengadaan LAF (Laminari Air Flow)
15. Penambahan ruang ICU,HCU, PICU, NICU dan IBS Penambahan kantin/cafetaria
16. Penambahan gudang aset
17. Perluasan lantai barat kenanga menjadi 3 lantai untuk laboratorium dan Ruang Rawat Inap

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	147.508.935.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	147.508.935.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	25.405.626.424	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	25.405.626.424	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 orang/bulan	25.405.626.424	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 orang/bulan	25.405.626.424	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD	Persentase Capaian Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	341.956.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD	Persentase Capaian Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	341.956.160	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	1 laporan	341.956.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	1 laporan	341.956.160	
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD	Persentase Capaian Penyediaan BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	121.803.807.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD	Persentase Capaian Penyediaan BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	121.803.807.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)	100% (23 jenis)				kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)	100% (223 jenis)		
			Cost Recovery Ratio (CRR)/kemampuan pendapatan untuk membiayai operasional	91%				Cost Recovery Ratio (CRR)/kemampuan pendapatan untuk membiayai operasional	91%		
			Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Mencapai Target	≥ 80%				Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Mencapai Target	≥ 80%		
			Status akreditasi rumah sakit	Paripurna				Status akreditasi rumah sakit	Paripurna		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	121.803.807.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	121.803.807.000	
			Jumlah Gedung yang Terbangun	1 unit				Jumlah Gedung yang Terbangun	1 unit		
			Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 Dok				Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 Dok		
			Dokumen hasil survei kepuasan staf dan karyawan	1 Dok				Dokumen hasil survei kepuasan staf dan karyawan	1 Dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen laporan dan Analisis SPM	2 Dok				Jumlah Dokumen laporan dan Analisis SPM	2 Dok		
			Jumlah Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Mencapai Target	108 Indikator				Jumlah Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Mencapai Target	108 Indikator		
			Jumlah laporan yang disusun (LKJIP, LKPJ/LPPD, POK,Renja, RKT,Profil)	6 dok				Jumlah laporan yang disusun (LKJIP, LKPJ/LPPD, POK,Renja, RKT,Profil)	6 dok		
			Jumlah Dokumen RKA,DPA, dan RBA	6 dok				Jumlah Dokumen RKA,DPA, dan RBA	6 dok		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD tersusun tepat waktu	1 dokumen				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD tersusun tepat waktu	1 dok		
			Jumlah dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja APBD dan BLUD terverifikasi	1.910 dok				Jumlah dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja APBD dan BLUD terverifikasi	1.910 dok		
			Kenaikan Kunjungan Pelayanan Unggulan	2%				Kenaikan Kunjungan Pelayanan Unggulan	2%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah penderita HIV/AIDS mendapatkan pelayanan VCT dan CST	122 pasien				Jumlah penderita HIV/AIDS mendapatkan pelayanan VCT dan CST	122 pasien		
			Jumlah kasus geriatri mendapat penanganan di Instalasi Rawat Jalan	31.000 kunjungan				Jumlah kasus geriatri mendapat penanganan di Instalasi Rawat Jalan	31.000 kunjungan		
			Jumlah kelompok binaan paguyuban penderita penyakit degeneratif	2 kel				Jumlah kelompok binaan paguyuban penderita penyakit degeneratif	2 kel		
			Jumlah Pokja yang dilakukan Penilaian	16 Pokja				Jumlah Pokja yang dilakukan Penilaian	16 Pokja		
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk : BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)	60%	25.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk : BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)	60%	25.000.000.000	
			LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari),	3 hari				LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari)	3 hari		
			TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)	3 hari				TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)	3 hari		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali) GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien) NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien)	50 kali $\leq 25 \text{ ‰}$ $\leq 15 \text{ ‰}$				BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali) GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien) NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien)	50 kali $\leq 25 \text{ ‰}$ $\leq 15 \text{ ‰}$		
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	100%	25.000.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	100%	25.000.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	1 paket	25.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	1 paket	25.000.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Besaran Pagu Indikatif sesuai dengan usulan rencana kegiatan anggaran yang juga tercantum dalam aplikasi SIPD Kabupaten Banjarnegara
2. Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan program kegiatan berdasarkan pemenuhan kebutuhan rumah sakit sebagai upaya peningkatan pelayanan di tahun 2024
3. Indikator program dan kegiatan merupakan target dan tolak ukur keberhasilan dimana hasil capaian digunakan dalam pengambilan keputusan/kebijakan ditahun berikutnya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tidak terlepas dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, utamanya untuk sub bidang upaya kesehatan rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan prioritas pembangunan nasional Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Telaah terhadap program pembangunan Kementerian Kesehatan yaitu Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga telah menetapkan lima fokus strategi pembangunan kesehatan untuk 5 tahun ke depan, yaitu kesehatan Ibu dan anak, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penguatan sistem kesehatan serta pengawasan obat dan makanan.

Ada empat isu kesehatan yang harus diselesaikan Kemenkes RI saat ini yaitu stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan, serta isu kesehatan global yang tengah ramai di Indonesia dan perlu segera ditangani yakni Covid-19 yang mewabah di tingkat global dan telah ditetapkan WHO sebagai *public health emergency and*

international concern terkait hal itu maka pemerintah daerah harus menempatkan kesehatan di prioritas tinggi, terutama di masa pandemi.

Selain itu pula akan dilaksanakannya Reformasi Sistem Kesehatan difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, inovasi pembiayaan kesehatan, dan optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017 – 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Sesuai Tupoksi RSUD maka dari ke 4 misi RPJP Kabupaten Banjarnegara tahun 2005-2025 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tetap mendukung misi lainnya.

Misi Ke 4 :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung

dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Pertama (2005 - 2009)
2. RPJM Daerah Kedua (2010 - 2014)
3. RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)
4. RPJM Daerah Keempat (2020 - 2024)

Untuk rencana kerja tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dengan arah kebijakan **“Pemantapan Kondusivitas Wilayah Untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian”** dengan prioritas peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

3.1 Program dan Kegiatan

3.1 Tabel Program dan Kegiatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolak Ukur		Target						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.383.437.313			22.383.437.313							
1	02	01	2.02	01	Penyediaa Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Kab. Banjarnegara	Paripurna	322 orang/bulan	100 %	22.383.437.313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah	100 %	22.383.437.313		
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													449.330.000			449.330.000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	Persentase Capaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Paripurna	1 laporan	100 %	449.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya kapasitas pegawai	100 %	449.330.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					121.803.807.000				121.803.807.000				
1	02	01	2.0	01	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Persentase indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) di bawah Bagian Tata Usaha yang mencapai target	Kab. Banjarnegara	Paripurna	1 dok	≥ 80%	121.803.807.000	Pendapatan BLUD	Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	121.803.807.000	
					Jumlah Dokumen hasil survey kepuasan staf dan karyawan		1 dok											
					Jumlah Dokumen laporan penilaian capaian dan analisis SPM		2 dok											
					Jumlah Indikator Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit mencapai target		108 Indikator											
					Jumlah laporan kinerja yang disusun (LKJIP, LKPJ/LPPD, POK, Renja, RKT, Profil)		Ratio (CRR)/kemampuan pendapatan untuk membiayai operasional			6 dok	90%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolak Ukur	
			Jumlah Dokumen RKA, DPA, dan RBA	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan									
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD dan BLUD tersusun tepat waktu										
			Jumlah dokumen surat pertanggungjawaban belanja APBD dan BLUD terverifikasi										
			Jumlah kunjungan pelayanan unggulan	Kelengkapan jenis pelayanan spesialis	Kab. Banjarnegara	Paripurna	2%	23 jenis					
			Jumlah penderita HIV/AIDS mendapatkan pelayanan VCT dan CST		Kab. Banjarnegara		122 pasien						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Jumlah kasus geriatri mendapat penanganan di Instalasi Rawat Jalan		Kab. Banjarnegara		31.000 kunjungan							
			Jumlah kelompok binaan paguyuban penderita penyakit degeneratif		Kab. Banjarnegara		3 kelompok							
			Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Capaian Penyediaan BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Banjarnegara		1 unit kerja	100%						
			Jumlah Gedung yang terbangun				1 unit							
			Jumlah Pokja yang dilakukan Penilaian	Status Akreditasi Rumah Sakit	Kab. Banjarnegara	Paripurna	16 pokja	Paripurna						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					25.000.000.000				25.000.000.000				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000.000				25.000.000.000				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio pemenuhan standar kualitas pelayanan Rumah Sakit : BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%) LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari) TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari) BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kab. Banjarnegara	60%	1 paket	100%	25.000.000.000			Meningkatkan Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	100%	25.000.000.000
										3 hari								
											3 hari							
											50 kali							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
		GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien) NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien)			Kab. Banjarnegara	≤ 25 %									
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					-				-	
1	02	03	2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA					-			-		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 yang terbayarkan	Persentase Capaian Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan	Kab. Banjarnegara	100%	1 tahun	100%			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
- c. Peningkatan Pelayanan BLUD;

Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- c. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang diarahkan pada :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Januari 2023

DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA

dr. ERNA ASTUTY
NIP. 19710830 200012 2 001